

IMPLEMENTASI HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PT PETROGAS JATIM UTAMA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DI DESA NGINGAS KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Eka Mai Kristiawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (ekamai.kristiawati3@gmail.com)

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

Abstrak

Kemandirian daerah didalam penyiapan energinya sendiri diwujudkan oleh Pemerintah dengan membuat kebijakan melalui program *City Gas* dengan memanfaatkan hasil eksploitasi gas Lapindo Berantas Inc agar dapat digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri untuk memasak. Pada pelaksanaannya PT Petrogas Jatim Utama selaku operator dalam program *City Gas* ini mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan harga jual gas bumi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi Di Kelurahan Wedoro dan Di Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, serta memenuhi ketentuan mutu layanan untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas. Dalam pelaksanaannya, ditemui masalah yakni warga merasa keberatan dengan adanya batas minimum penggunaan yang telah ditentukan, dengan harga Rp. 3.148,- warga mengeluhkan nyala api yang kecil, adanya pemutusan saluran jaringan gas karena tidak membayar tagihan akibat sosialisasi yang belum merata, serta belum optimalnya pembayaran secara online. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi harga jual gas bumi untuk konsumen rumah tangga melalui pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Manager Operasional PT Petrogas Jatim Utama, Kepala Keuangan PT Petrogas Jatim Utama, Sekretaris Desa Ngingas serta beberapa responden masyarakat Desa Ngingas yang menjadi target *group* dalam pelaksanaan program *City Gas* dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan harga jual gas bumi melalui pipa PT Petrogas Jatim Utama di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat dari 6 variabel model analisis Van Metter dan Carl Van Horn, meliputi 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, dalam program ini yang menjadi tolok ukur program tersebut dapat dirasakan oleh seluruh warga dengan tujuan dapat mencapai kemandirian daerah dalam penyiapan energinya sendiri, 2) sumberdaya manusia sudah memenuhi baik dalam kualitas dan kuantitas. Pembiayaan program berasal dari APBN, warga mendapat pipa distribusi dan alat cek meter. Terkait dengan waktu Petrogas sudah menetapkan jadwal pembayaran dengan dua gelombang serta dengan didukung fasilitas yang baik, 3) Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini masih belum optimal, mengingat tidak adanya pengawasan terkait dengan kegiatan penyambungan jaringan gas oleh warga sendiri, 4) Disposisi, terlihat adanya respon positif dari agen pelaksana, 5) Komunikasi, belum adanya sosialisasi yang merata untuk warga terkait dengan program ini, 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, bahwa dengan adanya abonemen yang ditetapkan warga merasa keberatan karena rata-rata mereka berpenghasilan rendah, dalam hal sosial pengetahuan warga terkait dengan inovasi pembayaran online masih rendah, dalam hal politik semua agen pelaksana mendukung adanya program tersebut.

Kesimpulannya, pelaksanaan kebijakan harga jual gas bumi melalui pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan, tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Saran-saran yang dapat diperhatikan adalah 1) Perlu adanya sosialisasi yang lebih merata kepada konsumen khususnya warga Desa Ngingas terkait dengan informasi keterlambatan pembayaran tagihan setiap bulannya dan sanksi yang harus diterima serta lebih mengoptimalkan pembayaran secara online sehingga inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan dapat berhasil dan perlu adanya pengawasan oleh pelaksana dalam hal penyambungan pipa jaringan yang dilakukan sendiri oleh warga 2) Perlu adanya perbaikan jaringan gas dalam menjamin volume pasokan dan tekanan gas bumi dan pemeriksaan alat-alat jaringan gas. Hal ini terkait dengan nyala api yang kecil.

Kata Kunci : Implementasi, Harga Jual Gas Bumi.

IMPLEMENTATION OF THE SELLING PRICE OF NATURAL GAS THROUGH THE PIPE PT PETROGAS JATIM UTAMA TO CONSUMERS HOUSEHOLD IN NGINGAS VILLAGE, WARU DISTRICT SIDOARJO REGENCY

Eka Mai Kristiawati

S1 Public Administration, FIS, UNESA (ekamai.kristiawati3@gmail.com)

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

Abstract

In order to reach regional independency of energy in the preparation of its own, the government makes policy through programs with city gas use of the exploitation lapindo eradicate the gas inc so can be used of a society in fulfilling their needs own to cook. In implementation of PT Petrogas Jatim Utama as the operators in gas program this city have a responsibility to implement the selling price of natural gas that has been set by the agency managing downstream oil and gas number 1 year 2012 about the selling price of natural gas through pipelines pt petrogas jatim main to consumer households at pipe network distribution in Wedoro district and in Ngingas district Waru sub-district Sidoarjo, and meet the provisions of quality service to consumers household in the Ngingas village. In its implementation encountered problems is residents objected with the introduction of the minimum limits the use of which have been determined, with the price of Rp.3.148, residents complained about -- flame that small the termination. The termination of the gas network for not paying bills due to the socialization not equal, as well as ineffective payment online. The purpose of this research to describe the implementation of the selling price of natural gas to consumer households through the pipe PT Petrogas Jatim Utama to consumer households in the village Ngingas Waru district Sidoarjo Regency.

The kind of research in this thesis is research descriptive. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The subject of study in this is manager of operations of PT Petrogas Jatim Utama, chief financial PT Petrogas Jatim Utama, staff administration of PT Petrogas Jatim Utama, village Ngingas as well as several other respondents the village community ngingas was the target group in the implementation of programs city gas by using a technique of the data analysis interactive model Miles and Huberman. The result showed the implementation of the selling price of natural gas through the pipe PT Petrogas Jatim Utama in the village Ngingas Waru district Sidoarjo, can be seen from 6 variable model analysis Van Metter and Carl Van Horn, covering 1) size and purpose policy in this program who became a yardstick the program can be felt by all the citizens with the aim of can reach regional independency of energy in the preparation of its own 2) human resources already meet either in quality and quantity. Financing of the scheme comes from the national residents got distribution pipe instrument checks and meters. Relating to time Petrogas already set the schedule the payment with two waves as well as facilities with supported that good 3) implementers characteristic agent in this still not optimum considering the absence of supervision of activities associated with tissue grafting gases by residents own 4) disposition, visible the presence of a positive response from agent committee said 5) communication, the lack of socialization field for the related to this program, 6) economic environment, social and political, that with the abonemen set they felt mind since on average their income is low, in terms of social knowledge related residents with that of innovative online payment is still low, in matters of politics all the agents supporting a implementing the program.

In conclusion, the selling price of natural gas through PT Petrogas Jatim Utama pipeline for household consumers in rural district Ngingas Waru Sidoarjo been going on but has some constraints in the implementation. Advices for are 1) that may be needed for more equitable the ngingas village especially those related to information for the bills every month and sanctions that must be accepted and to optimize the online that innovations in order to increase service quality can be succeed 2) the need of repair of tissues in the gas pressure and guarantee the supply of natural gas and the gas network equipment. It is associated with a small flame.

The keywords: implementation, selling price natural gas

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan gas alam di Indonesia yang diakui lebih unggul bila dibandingkan kebanyakan negara di dunia pada kenyataannya belum dimanfaatkan secara maksimal. Tidak heran jika hal tersebut menjadi prioritas Pemerintah untuk menindaklanjutinya. Selain

menyediakan gas *elpiji* kemasan tabung yang sudah berjalan maka berikutnya adalah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga.

Beberapa permasalahan pada saat pelaksanaan program konversi minyak tanah ke *elpiji* seperti minimnya pengetahuan mengenai prosedur, fungsi, dan cara penggunaan *elpiji* yang menyebabkan

kebocoran gas dan mengakibatkan korban tewas, turut menjadi alasan yang kuat untuk mendorong Pemerintah membuat kebijakan baru dengan memanfaatkan hasil eksploitasi gas bumi dalam program yang diberi nama *City Gas* atau pemanfaatan gas bumi dengan slogan lebih murah, aman dan ramah lingkungan. Gas bumi merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk gas. Gas bumi sering disebut juga dengan gas alam, gas tersebut dapat ditemukan di ladang minyak atau tambang batu bara. Gas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti bahan bakar industri, transportasi dan juga untuk kebutuhan rumah tangga.

Program pemanfaatan gas bumi yang digagas pada tahun 2010 ini bertujuan untuk mencapai kemandirian daerah didalam penyiapan energinya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Kedua, tujuannya untuk kesejahteraan warga, dan mengurangi beban subsidi minyak terutama subsidi gas tabung *elpiji* berukuran 3 Kilogram yang sudah mencapai 74 triliun (Sumber : Dokumen Sejarah gas bumi oleh PT. Petrogas Jatim Utama). Ketiga, dari adanya program gas bumi untuk konsumen rumah tangga ini adalah baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah akan menerima manfaat secara langsung dari usaha eksploitasi gas. Program ini sekaligus merupakan suatu upaya untuk menguatkan program konversi minyak tanah ke gas *elpiji* seperti kebijakan sebelumnya.

Pelaksanaan program *City Gas* ini menyediakan kuota sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM), dengan jumlah keseluruhan sasaran rumah tangga sebesar 57.000 atau rata-rata 4.650 rumah tangga sasaran per kabupaten atau kota secara Nasional. Penerima bantuan gas bumi ini diprioritaskan pada desa-desa yang berada di ring dalam satu lokasi tempat adanya eksploitasi gas. (Sumber : Moch khamdun, dalam SuaraBanyuUrip.com diakses tanggal 29 september 2014).

Pada pelaksanaan program *City Gas* tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas menunjuk Lapindo Berantas Inc (LBI) sebagai pemasok gas dan yang menjadi operator dari program *City Gas* ini diserahkan kepada PT. Petrogas Jatim Utama. PT. Petrogas Jatim Utama adalah sebuah badan usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah memenangkan tender pada tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan pengumuman pemenang tender yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM No.0651 K/12/MEM/2013 3 Maret 2011. Program yang bekerjasama dengan Lapindo Berantas Inc (LBI) ini memiliki perbandingan volume satu kilogram gas

elpiji sama dengan 1,3 meter kubik gas. Harga satu kilogram *elpiji* sekitar Rp 7.000 sedangkan satu meter kubik gas bumi ini seharga Rp 3,148. Sehingga menggunakan sambungan gas rumah tangga jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan *elpiji*. (sumber: <http://dprd-sidoarjo.go.id/sambungan-gas-rumah-tangga-lebihmenguntungkan.html>, diakses tanggal 24 November 2014).

Pada tahun 2011, pelaksanaan program *City Gas* telah dilakukan di beberapa kota seperti Bontang, Bekasi dan Sidoarjo. Di Sidoarjo sendiri tidak hanya Desa Wedoro saja yang sudah menjalankan program tersebut, Desa lain yang menjadi percontohan program *City Gas* ini adalah Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Dwi Selaku Kepala Keuangan PT. Petrogas Jatim Utama, alasan yang menjadikan Desa Ngingas menjalankan program *City Gas* Utama yakni:

“Desa Ngingas dipilih untuk menjalankan program *City Gas* ini adalah pertama, sudah tersedianya jaringan gas karena Desa Ngingas dekat dengan sumber gas bumi, yakni Lapindo. Kedua, Desa Ngingas dekat dengan operator jaringan gas yakni PT Petrogas Jatim Utama. Ketiga, Desa Ngingas dapat dikatakan Desa yang penduduknya dalam kategori miskin. Dan keempat mayoritas penduduknya menjalankan UMKM, pedagang dan buruh (Hasil wawancara tanggal 14 Desember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, yang menjadikan Desa Ngingas dipilih untuk menjalankan Program *City Gas* yakni, pertama Desa Ngingas dekat dengan sumber gas bumi. Kedua, Desa Ngingas dekat dengan operator jaringan gas. Ketiga, mayoritas penduduknya dalam kategori warga miskin, mayoritas berprofesi sebagai pedagang dan menjalankan UMKM sehingga Desa Ngingas juga dijuluki sebagai Desa Logam yang memproduksi perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan otomotif. Guna mendukung pernyataan tersebut berikut merupakan data jumlah penduduk Desa Ngingas tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Desa Ngingas tahun 2009 sampai dengan tahun 2013

No	Tahun	Jumlah Jiwa	Jumlah Penduduk Miskin	Dalam Persen (%)
1.	2009	779	325 KK	5,8

2.	2010	800	359 KK	6,0
3.	2011	800	359 KK	6,0
4.	2012	695	278 KK	5,1
5.	2013	695	278 KK	5,1

(Sumber : Data jumlah Penduduk Miskin Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun, 2013)

Berdasarkan data jumlah penduduk pada tabel 1.1 jumlah penduduk miskin di Desa Ngingas tersebut pada tahun 2009 sebesar 779 ribu jiwa, mengalami pertambahan pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 6,0 %. Dan pada tahun 2012 sampai pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 5,1%.

Melihat data tersebut, harga yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp 3.148,- disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat secara ekonomi. Harga jual yang relatif lebih murah bila dibandingkan dengan *elpiji* tersebut di tetapkan pada Peraturan Badan Hilir Minyak dan Gas Nomor 1 Tahun 2012 yang menyebutkan:

Harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga yang dijual oleh PT Petrogas Jatim Utama pada Jaringan Pipa Distribusi di Kelurahan Wedoro dan di Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp3.148,00/M³.

Harga jual yang lebih murah ini sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh warga, salah satu warga yang sudah merasakan manfaat dari program ini merasa sangat diuntungkan. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar sehari-hari ini relatif lebih murah. Ibu Lesti, menyatakan bahwa:

“Mau masak setiap hari ya gasnya cukup gak takut kehabisan, nggak perlu beli-beli lagi bawa tabung, tinggal puter saluran gas masak jadi nggak khawatir lagi. Harganya juga murah dari pada gas *elpiji*. Sehari-hari full masak nggak masalah, tapi kadang nyala apinya kecil untuk alatnya aman dipakai (Hasil wawancara tanggal 3 Desember 2014)”.

Meskipun sebagian besar masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya Program *City Gas* yang harga jualnya relatif lebih murah dari harga *elpiji*,

namun pada pelaksanaannya dengan adanya pembatasan minimal atau abonemen penggunaan gas bumi tersebut untuk sebagian warga Desa Ngingas dirasa membebankan, mengingat rata-rata warga hanya menggunakan 5-7 meter kubik saja setiap bulannya, sedangkan dalam peraturan pembayaran tagihan minimum 10 meter kubik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 22/P/BPH Migas/VII/2011 Tentang Penetapan Harga Jual gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Bab IV Pasal 8 Ayat 1 yang menyebutkan:

“Pengenaaan biaya minimum untuk RT-1 dan RT-2 ditetapkan sebesar 10 M³/bulan”.

Ditetapkannya peraturan tagihan minimum oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tersebut membuat warga merasa keberatan, mengingat hanya Badan Pengatur Hilir saja yang menetapkan tanpa perundingan dengan konsumen rumah tangga sebelumnya. Hal ini juga disebutkan pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Bab VII mengenai pengusulan dan penetapan harga gas bumi Pasal 32 yang menyebutkan:

“Dalam menetapkan harga jual gas bumi Badan Pengatur tidak memerlukan persetujuan dari Badan Usaha dan/atau konsumen gas bumi dan tidak didasarkan kepada kesepakatan antara Badan Usaha dan konsumen gas bumi”.

Selain adanya masalah terkait dengan abonemen, masalah lain muncul yakni dengan harga Rp 3.148 M³ warga mengeluhkan nyala api yang kecil. Tidak hanya itu saja komunikasi yang dilaksanakan oleh agen pelaksana juga dirasa belum merata, ada sebagian warga Desa Ngingas yang tidak mengetahui jika warga diharuskan membayar tagihan setiap bulannya, karena keterlambatan pembayaran tagihan tersebut sehingga mengakibatkan adanya pemutusan sambungan jaringan gas di rumah-rumah warga. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Jul, salah satu warga Desa Ngingas:

“Saya pernah telat bayar mbak terus diputus jaringan gasnya, soalnya nggak tau kalau itu harus bayar, saya kira gratis. Saya taunya dari tetangga kalau itu disuruh bayar. (Hasil

Berdasarkan masalah tersebut, maka fokus dari penelitian ini adalah **“Implementasi harga jual gas bumi melalui pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”**. Penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter Van Horn dan. Skripsi ini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan harga jual gas bumi di desa tersebut dan alasan peneliti menggunakan model implementasi Van Meter Van Horn adalah adanya permasalahan tentang karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik turut mempengaruhi pelaksanaan program tersebut dan peneliti menganggap variabel-variabel yang ada yakni : (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, (2) sumber Daya (3) Karakteristik Agen Pelaksana (4) Sikap para Pelaksana (5) Komunikasi antar Organisasi dan badan pelaksana dan (6) Kondisi sosial, ekonomi, politik, mampu menjawab permasalahan yang ada dalam implementasi Harga jual gas bumi untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya adalah Bagaimana Implementasi harga jual gas bumi melalui pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan harga jual gas bumi melalui pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga pada jaringan pipa distribusi di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan pengembangan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai Implementasi kebijakan dalam program tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Instansi, PT Petrogas Jatim Utama

Melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk perbaikan program *City Gas* di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

c. Bagi Universitas Negeri Surabaya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi maupun literatur untuk penelitian selanjutnya.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

1. Kebijakan Publik

Kebijakan membutuhkan aktor sebagai perencana atau sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri. Menurut Lemieux dalam Wahab (2015:15) merumuskan kebijakan publik sebagai produk-produk aktivitas yang dimaksud untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor publik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Sedangkan, menurut Carl Frederich dalam Agustino (2008 : 7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan guna dalam mengatasi tujuan tersebut dapat tercapai. Kebijakan merupakan bagian dari kegiatan, maksudnya adalah kebijakan berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud dan tujuan kegiatan dari pemerintah tidak mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang

mempunyai maksud merupakan suatu bagian terpenting dari definisi kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi mempunyai peranan penting dalam suatu proses kebijakan karena tanpa adanya suatu implementasi yang efektif maka keputusan dari pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan dengan baik.

Daniel Maxmanian dan Paul Sabatier (1983 : 61) dalam Agustino (2006 : 139), bahwa :

“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan yang dasar, biasanya hal tersebut dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.”

Van Meter Van Horn dalam Budi Winarno (2002 : 102) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Riant D Nugroho (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan salah satu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Mengimplementasikan kebijakan publik,

ada dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni:

- 1) Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau
- 2) Melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan tersebut diterapkan atau tidak hanya terbatas pada tindakan unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan dapat menimbulkan kepatuhan target group, tetapi juga berlanjut pada jaringan kekuatan sosial, ekonomi maupun politik yang dapat berpengaruh pada perilaku semua pihak yang pada akhirnya bisa ditemukan dampak yang diharapkan atau tidak diharapkan. Implementasi program merupakan suatu hal yang kompleks, mengingat didalamnya terdapat banyak faktor yang saling memberikan pengaruh dalam suatu sistem yang tidak akan lepas dari keadaan suatu lingkungan yang cenderung berubah-ubah.

Implementasi program *City Gas* di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo merupakan implementasi kebijakan Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi dengan menunjuk Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi percontohan dilaksanakannya program tersebut yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kota Bontang. Pada pelaksanaan program *City Gas* di Desa Ngingas, PT. Petrogas Jatim Utama ditunjuk sebagai operator pelaksanaannya. Tujuan penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga yakni, optimalisasi peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur gas bumi, meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri. Program yang digagas oleh Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi ini pelaksanaannya berwujud penyediaan bahan bakar minyak bumi yang disalurkan melalui pipa yang dapat digunakan oleh konsumen (rumah tangga) setiap harinya

untuk memasak dengan biaya yang relatif lebih murah, praktis, aman, dan ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan gas elpiji pada umumnya.

3. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006 :28) sebagai berikut :

“Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, pergerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

Program merupakan rencana dengan menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran. Ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu program menurut Siagian, sebagai berikut :

1. Sasaran yang dikehendaki,
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya anggaran yang diperlukan beserta sumbernya,
4. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan;
5. Tenaga kerja dari sudut kualifikasi serta keahlian ataupun keterampilan yang diperlukan, Siagian dalam Tachjan (2006:33)

Kemudian Tachjan (2006 : 35) mendefinisikan *target group* merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa kemudian perilakunya tersebut akan dipengaruhi oleh kebijakan. Implementasi dari kebijakan tersebut dapat mereka patuhi atau sesuaikan berdasarkan isi kebijakan (program) yang mereka harapkan. Kemudian karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran meliputi : kelompok sasaran, jenis kelamin,

pengalaman, tingkat pendidikan, usia dan keadaan sosial ekonomi dapat mempengaruhi efektivitas dari implementasi tersebut. Karakteristik yang dimaksud tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan geografis maupun lingkungan sosial budaya.

4. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut Islamy dalam Widodo (2009 : 14) implementasi dibagi dalam dua bentuk, yakni :

1. Bersifat Self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
2. Bersifat non Self-executing, yang berarti bahwa suatu kebijakan publik diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Sesuai dengan konteks ini program *City Gas* khususnya dalam implementasi harga jual gas bumi untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas termasuk kebijakan yang bersifat non Self-executing, mengingat program ini perlu diwujudkan oleh berbagai pihak agar tujuannya dapat dicapai. Hoogwood dan Gunn dalam Wahab (2004 : 77) menjelaskan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

- a. Tahap I : terdiri atas kegiatan-kegiatan yang menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas, yaitu menentukan standard pelaksanaan dan menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
- b. Tahap II : merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staff, sumber daya, prosedur, anggaran serta metode.
- c. Tahap III : merupakan kegiatan-kegiatan, berupa menentukan jadwal dan dilakukan pemantauan.

Selalu diadakan pengawasan guna menjamin berlangsungnya pelaksanaan suatu program, dengan tujuan jika ditemui

penyimpangan atau pelanggaran selama pelaksanaannya, maka dapat segera mengambil tindakan yang sesuai.

5. Model Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik memiliki banyak model implementasi yang dapat digunakan sebagai pisau analisis kebijakan yang sedang dalam tahap proses implementasi. Model implementasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah model implementasi menurut Donals S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Van Meter Van Horn dalam Nugroho (2008 : 75), menunjukkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan *A Models of The Policy Implementation*, yakni :

- 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
- 2) Sumber-sumber kebijakan;
- 3) Karakteristik badan pelaksana;
- 4) Sikap para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; dan Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Variabel tersebut diantaranya :

1. *Pertama*, ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada dilevel pelaksana kebijakan. Jika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka kebijakan publik tersebut sulit untuk direalisasikan pada titik yang dapat dinyatakan berhasil. Ukuran dari kebijakan *City Gas* ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja pelaksana program dalam tercapainya tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. *Kedua*, Sumber daya kebijakan merupakan suatu proses keberhasilan implementasi kebijakan yang dapat dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan juga waktu. Ketiga sumber kebijakan tersebut mempunyai peranan penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peranan sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan, modal digunakan untuk

mendukung kelancaran pembiayaan kebijakan sehingga tidak ditemui hambatan dalam pelaksanaannya. Ketiga merupakan waktu, hal ini juga menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program atau kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Program *City Gas* ini dilakukan oleh pelaksana, yang diimplementasikan pada masyarakat di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pengawasan tetap dilakukan staff Kelurahan dan sebagai operator program tersebut yakni PT. Petrogas Jatim Utama. Selain sumber daya manusia yang sudah memadai dalam program ini, *City Gas* juga mendapatkan anggaran penyediaan alat-alat dari APBN

3. *Ketiga*, Menurut Van Meter Van Horn dalam Subarsono (2006). Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dapat juga dilihat dari ciri atau sifat instansi pelaksana kebijakan. Hal ini menjadi penting mengingat kinerja implemetasi kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat atau ciri yang sesuai dengan agen pelaksananya. Kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri dari para aktor, kualitas tersebut meliputi tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja serta integritas moralnya. Pelaksana dari program *City Gas* dalam implemetasi harga jual gas bumi ini adalah aparaturnya Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan sebagai operator program ini pelaksananya adalah PT. Petrogas Jatim Utama yang personilnya sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dibebankan pada yang bersangkutan. PT. Petrogas Jatim Utama telah ditunjuk resmi oleh Menteri ESDM melalui pemenang tender berdasarkan pengumuman hasil keputusan yang sudah ditentukan, yakni ESDM No.0651 K/12/MEM/2011 3 Maret 2011.

4. *Keempat*, Van Meter Van Horn dalam winarno (2002), mengungkapkan bahwa karakteristik agen pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Tanggungjawab dari agen pelaksana harus dilandasi oleh sikap disiplin, karena hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pada konteks penelitian ini, sikap/disposisi dapat dilihat dari komitmen yang diberikan

agen pelaksana dalam implementasi harga jual gas bumi untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

5. *Kelima*, Van Meter Van Horn mengungkapkan, bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi dalam implementasi kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para agen pelaksana. Keberhasilan pada implementasi harga jual gas bumi untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo akan berhasil jika pelaksana kegiatan yakni Perangkat Desa dan anggota dari PT. Petrogas Jatim Utama secara intensif melakukan sosialisasi mengenai tujuan, manfaat dan harga jual program ini kepada seluruh warga Desa Ngingas melalui berbagai media.

6. *Keenam*, dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam suatu kebijakan publik merupakan hal yang cukup menarik perhatian. Van Meter Van Horn mengungkapkan :

“sejauhmana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial dan politik. Dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik dukungan elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan”.(Van Meter Van Horn dalam Winarno (2002)

Ketiga hal tersebut (kondisi sosial, ekonomi, dan politik) dapat mempengaruhi pandangan terhadap masalah, sehingga akan mempengaruhi cara pelaksanaan program. Dukungan dari semua agen pelaksana dan target *group* dalam hal ini dibutuhkan dalam keberhasilan pelaksanaan program *City Gas* pada implementasi harga jual gas bumi melalui pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

B. Tinjauan Tentang Program City Gas

1. Pengertian Program City Gas

Gas Bumi melalui jaringan pipa sebagai kebutuhan energi untuk penggunaan rumah tangga telah dikenal di banyak negara termasuk Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Migas telah melakukan upaya tepat dengan membangun jaringan pipa untuk rumah tangga di beberapa daerah termasuk diantaranya untuk Kabupaten Sidoarjo.

Adanya pembangunan gas bumi untuk masyarakat ini merupakan salah satu langkah dari Pemerintah untuk mencapai kemandirian daerah dalam penyiapan energinya sendiri dan membantu masyarakat agar dapat memanfaatkan hasil eksploitasi gas yang ada. Program ini juga sekaligus untuk menguatkan program konversi minyak tanah ke gas. Setelah pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga ini selesai, Pemerintah mencari pengelola operasi jaringan tersebut agar tujuan pembangunan jaringan Gas Bumi di tiap kota dapat tepat sasaran, maka Pemerintah melaksanakannya dengan proses tender yang terbuka.

Diharapkan dengan pengelolaan operasi yang baik maka akan terjaganya tujuan Pemerintah dalam jangka panjang yaitu terpeliharanya aset Negara dan diharapkan di kemudian hari dapat dikembangkan ke wilayah yang lebih luas lagi, sehingga cita-cita membangun *City Gas* dengan harga yang relatif lebih murah, aman dan ramah lingkungan di tiap kota dapat tercapai.

2. Karakteristik Gas Bumi untuk Rumah Tangga

Karakteristik Gas Bumi untuk Rumah Tangga seyogyanya mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- Aman dipakai karena tekanannya sangat rendah
- Sifat gas lebih ringan dari udara sehingga apabila terjadi kebocoran gas maka akan mudah menguap.
- Instalasi jaringan gas harus sesuai dengan standarisasi nasional yang aman.
- Harganya lebih murah dibandingkan dengan harga LPG, LNG dan BBM.

- e. Ramah lingkungan karena proses pembakaran dapat berlangsung mendekati sempurna.

(Sumber: Buku petunjuk pengguna gas bumi untuk konsumen rumah tangga PT. Petrogas Jatim Utama).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan model implementasi Van Metter dan Carl Vorn dalam menganalisis hasil penelitian, yang terdiri dari enam variabel yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, Disposisi, Komunikasi dan Lingkungan social, ekonomi dan politik. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT Petrogas Jatim Utama dan d Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bentuk penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Sumber data sekunder yang berasal dari arsip PT Petrogas Jatim Utama dan Dokumen dari Kelurahan Desa Ngingas.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis data pada penelitian ini menggunakan bentuk analisis data oleh Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2011:246) meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Deskripsi Implementasi Harga Jual Gas Bumi di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Pada hasil penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan hasil temuan dari penelitian yang telah dilaksanakannya. Pada dasarnya implementasi harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga merupakan sebuah kebijakan atau program Nasional yang dilaksanakan di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaannya yang bertugas sebagai operator pengoperasiannya adalah PT. Petrogas Jatim Utama, penelitian ini melibatkan data dari operator pelaksana dan

warga Desa Ngingas sebagai target group dalam program City Gas atau pemberian subsidi gas bumi untuk konsumen rumah tangga, gas bumi yang lebih murah, aman dan ramah lingkungan.

2. Deskripsi Lokasi Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Kondisi suatu wilayah mempunyai peran penting karena dapat mengetahui potensi yang ada disuatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas apa yang sesuai diterapkan di wilayah tersebut. Desa Ngingas merupakan salah satu Desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Sebagai wilayah teritorial kondisi fisik di wilayah ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program kebijakan dari Pemerintah.

Desa Ngingas berada di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur. Desa Ngingas memiliki luas wilayah 189,400 Ha yang secara administratif Pemerintahan terbagi menjadi 11 RW dan 37 RT dengan jumlah penduduk 13.403 jiwa.

3. Implementasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No 1 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Lemieux dalam Wahab (2015:15) kebijakan publik sebagai produk aktivitas yang dimaksud untuk memecahkan masalah publik yang terjadi pada lingkungan tertentu dan hal ini dilakukan oleh aktok publik yang mempunyai terstruktur dan aktivitas ini berjalan sepanjang waktu. Sedangkan menurut Van Metter Van Horn dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan baik individu atau pejabat-pejabat atau suatu kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan suatu kebijaksanaan atau yang sudah menjadi tujuan kebijakan.

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauhmana pelaksanaan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Harga jual gas bumi, khususnya harga jual gas bumi melalui pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk konsumen

rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn.

Penetapan harga jual gas bumi sebesar Rp 3.148,00/M³ mulai berlaku pada tahun 2012 sejak ditetapkannya. Penetapan harga tersebut berdasarkan dua hal, meliputi kemampuan daya beli konsumen rumah tangga dan harga tersebut harus dibawah harga elpiji. Hal senada di kemukakan oleh Bapak Santoso selaku Manager Operational PT . Petrogas Jatim Utama yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat diberikan harga Rp 3.148 ini dengan harapan tidak akan menambah beban pengeluaran sehari-hari. Harga ini tentunya disesuaikan dengan daya beli konsumen. Harga sekian ini masyarakat jadi bisa menghemat 30% sampai 50% setiap bulannya. Anggap saja satu bulan pemakaian elpiji 60 ribu kalau untuk gas bumi city gas ini hanya 30 ribu perbulan (Hasil wawancara pada tanggal 26 Maret 2015).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan biaya Rp 3.148 masyarakat bisa melakukan penghematan sampai dengan 50 %. Penghematan penggunaan gas bumi dengan harga yang sudah ditetapkan diungkapkan oleh ibu Lesti, salah satu warga Desa Ngingas yang juga sudah merasakan manfaatnya setelah menggunakan gas bumi dengan harga yang relatif lebih murah untuk kebutuhan sehari-hari. Bu Lesti menyatakan bahwa:

“saya yaa merasa terbantu mbak harga gas ini murah kalo dibanding sama pake elpiji, mau masak banyak sedikit yaaa ngga khawatir habis uang banyak. Penghematannya yaaa lumayan lho mbak setelah pake gas kayak gini ini. Sisa uang bulanan bisa dipakai buat jajan anak (Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2015)”.

Hal senada di ungkapkan oleh Bapak Mitha warga Desa Ngingas. Yang menyatakan bahwa:

“Sebelum saya menggunakan gas bumi ini, pengeluaran untuk membeli gas ini seratus

ribu lebih. Soalnya saya kan berjualan yaa mbak jadi pengeluaran untuk gas ini yaa cukup menguras isi dompet. Tapi sejak pakai gas bumi pengeluaran untuk gas nggak sampai seratus ribu, paling besar cuman Rp 90.000,- (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2015)”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa keberadaan program *City Gas* sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun pada pelaksanaannya harga yang telah ditetapkan ini ternyata untuk sebagian masyarakat masih dirasa tidak sesuai dengan penggunaan gas bumi tersebut, mengingat adanya peraturan pembatasan pemakaian dari Petrogas yakni kurang dari 10 M³ tetap dikenakan biaya 10 M³, sedangkan rata-rata penggunaan untuk rumah tangga per bulannya hanya sebesar 3 - 7 M³ saja, tentunya hal ini membuat masyarakat enggan untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Irul selaku Ibu RT 003 Desa Ngingas Selatan, yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya mbak harga Rp 3.148,- ini sudah murah sekali, tapi yang disayangkan adalah adanya peraturan yang menyatakan kalau menggunakan gas bumi ini kurang dari 10 M³ misalnya 7 M³ atau 9 M³ tetep bayarnya yaa 10 M³. Kalau misalnya kena 11 M³ yaa tetep bayarnya sesuai itu dan seterusnya. Nah kalau kebanyakan orang ini kan masak rata-rata habisnya 7 M³ paling pol kalau dia pedagang mungkin sampai 20 atau 25 M³. Ini kan bayarnya eman-eman yaa mbak (Hasil wawancara tanggal 16 Januari 2015)”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Jul, yang menyatakan bahwa:

“Iya mbak, ada batas minimal penggunaan. Saya pakai habis rata-rata 7 M³, tapi harus bayar 10 M³. Ya mau gimana lagi itu sudah peraturan (Hasil wawancara tanggal 21 Desember 2014)”.

Diberlakukannya peraturan dengan batas minimal penggunaan ini bagi beberapa masyarakat dianggap memberatkan, hal ini sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, pada Pasal 7 point (3) yang menyebutkan:

“(3) Pengenaan biaya minimum untuk RT- dan RT-2 ditetapkan sebesar 10M³/bulan”.

Hal tersebut kemudian mengakibatkan konsumen menyambung pipa sendiri untuk disalurkan ke rumah tetangga lain atau ke warung miliknya tanpa mengetahui cara penggunaan dan penyambungan yang berstandar Nasional

B. Pembahasan Implementasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Gas Bumi melalui PT. Petrogas Jatim Utama di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Penelitian mengenai Implementasi Harga Jual Gas Bumi melalui PT. Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, akan dianalisis menggunakan model implementasi menurut Van Metter dan Carl Van Horn yang terdapat enam variabel, yakni Ukuran dan tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderungan (Disposisi), Komunikasi dan Lingkungan Ekonomi, sosial serta Politik. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Harga Jual Gas Bumi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun

2012 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga pada Jaringan Pipa Distribusi di Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Keenam variabel tersebut akan dibahas lebih mendalam, sebagaimana dianalisis berasal dari data dan informasi yang diperoleh dari Badan Usaha yakni PT. Petrogas Jatim Utama dan Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru guna menjawab fokus penelitian ini. Berikut merupakan pemaparan dari analisis Implementasi Harga Jual Gas Bumi melalui pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, menggunakan enam variabel menurut Van Metter dan Carl Van Horn yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dalam suatu program kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan dengan baik. Ukuran dan tujuan kebijakan harus diketahui secara detail sehingga, pelaksanaannya dapat diketahui berhasil atau tidaknya dari kebijakan tersebut.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Harga jual gas bumi melalui pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga, yang sebelumnya diatur pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 Tentang Penetapan Harga Jual Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, dibuat dengan tujuan optimalisasi peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur gas bumi, meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri.

Donals Van Metter dan Carl Van Horn dalam model implementasi kebijakannya menjelaskan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan merupakan salah satu variabel untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan. Sehingga dapat diketahui berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut.

Ukuran keberhasilan kebijakan pada penelitian ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Dwi selaku Kepala Keuangan Petrogas, Bapak Achmad Zaini selaku Sekretaris Desa Ngingas, dan beberapa warga konsumen pengguna gas bumi, dengan harga yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sejak

tahun 2012, dan kebijakan program gas bumi ini dapat dikatakan berhasil jika pengguna tidak hanya di Desa Ngingas saja tetapi juga ada pengembangan di Desa lain di beberapa kota. Tujuan program ini adalah untuk mencapai kemandirian daerah di dalam penyiapan energinya sendiri sehingga dapat mensejahterakan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.

2. Sumber Daya

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yakni sumber daya, informasi mengenai kebijakan yang disampaikan hendaknya didukung dengan adanya kemampuan memadai sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Beberapa aspek dalam sumber daya meliputi : sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya waktu.

a. Sumber daya manusia (staff)

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam agustino (2008:142), sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia berkualitas hal ini disesuaikan dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja dari kebijakan tersebut akan sulit di implementasikan jika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya manusia tersebut tidak ada.

Sumber daya manusia di Kantor PT. Petrogas Jatim Utama dari segi kapasitas, menurut narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa sebagai pelaksana kebijakan atau operator dalam program tersebut sudah memadai. Diantaranya bertugas sebagai pengawas, petugas administrasi dan teknisi yang bertugas untuk memeriksa sambungan jaringan gas dan memperbaiki jika ada kerusakan dan bekerja di loket-loket pembayaran sebanyak 33 pegawai, serta adanya

petugas untuk cek meter sebanyak 4-5 pegawai yang di *rolling* ditugaskan untuk mengontrol alat meter pemakaian di setiap rumah warga. Selain itu di Desa Ngingas sendiri beberapa pegawai dari Kelurahan ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan menampung keluhan warga terkait dengan pelaksanaan program tersebut.

b. Sumber daya anggaran/ finansial

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang berkaitan dengan alokasi dana guna mendukung kelancaran pembiayaan sehingga tidak ditemui hambatan dalam pelaksanaannya karena tersedianya sumber daya manusia saja tidak cukup untuk melaksanakan kebijakan program tersebut.

Sumber daya finansial turut mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan suatu program. Sumber daya anggaran dalam awal pelaksanaan program *City Gas* ini berasal dari dana APBN. Dana tersebut digunakan untuk memfasilitasi alat-alat yang dibutuhkan sekaligus untuk membangun jaringan gas yang disalurkan ke beberapa titik yang dapat digunakan untuk konsumen rumah tangga. Sehingga konsumen tidak dipungut biaya sepeserpun untuk pembelian alat-alat.

Selanjutnya, pembayaran untuk pasokan gas ke Lapindo Berantas Inc, pembelian alat-alat perbaikan ataupun pemasangan baru untuk konsumen rumah tangga didapatkan dari iuran yang dibayarkan oleh konsumen setiap bulannya sesuai tagihan penggunaan.

Penyetoran yang dilakukan oleh Petrogas Jatim utama melalui Bank bisa mencapai Rp 600.000.000 per 11 hari (dari beberapa Desa yang dibawahhi oleh operator) kemudian digunakan untuk pembayaran pasokan gas sesuai dengan jumlah

pemakaian. Selain itu digunakan untuk pembelian alat-alat gas bumi untuk konsumen yang mengalami kerusakan. Konsumen yang ingin memasang jaringan baru dikenakan biaya sebesar Rp 5.000.000 dan untuk penyambungan jaringan setelah diputus karena konsumen telat membayar selama berbulan-bulan sebesar Rp 500.000.

c. Sumber daya waktu

Sumber daya waktu merupakan sumber daya terkait dengan ketepatan waktu. Adanya program *City Gas* ini bertepatan dengan adanya kelangkaan elpiji subsidi dari Pemerintah dan juga kenaikan harga BBM. Adanya program ini sekaligus untuk mencapai kemandirian daerah didalam penyiapan energinya sendiri. Pada pelaksanaan program tersebut dalam hal cek meter dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk. Pengecekan tersebut dilakukan setiap bulannya. Pembayaran terkait dengan tagihan yang dibebankan untuk konsumen dibayarkan di loket dekat Desa Ngingas setiap tanggal 11 sampai dengan tanggal 25, dan untuk pembayaran di kantor pusat setiap tanggal 26 sampai dengan tanggal 10. Program ini juga didukung dengan adanya fasilitas dalam pengadaan alat-alat yang dibutuhkan oleh konsumen pada awal pelaksanaan di subsidi dengan biaya APBN, selanjutnya untuk perbaikan dan penggantian baru konsumen sendiri yang mempunyai tanggungjawab akan hal itu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh karakteristik badan pelaksana. Karakteristik agen pelaksana tersebut menentukan tentang bagaimana kebijakan yang ada tersebut dapat dilaksanakan. Karakteristik agen pelaksana berkaitan dengan tugas dan spesialisasinya terhadap penyelenggaraan kebijakan dan luas cakupan

wilayah agen pelaksana. Spesialisasi dan tugas dari masing-masing agen pelaksana perlu diuraikan sehingga dapat menunjukkan sejauh mana karakteristik agen pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan.

Suatu keberhasilan yang dapat dicapai dalam menjalankan sebuah kebijakan tidak lepas dari karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Agustino (2008:143) mengungkapkan bahwa pusat dari perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam suatu implementasi kebijakan.

Pelaksanaan harga jual gas bumi melibatkan setidaknya agen pelaksana, diantaranya yaitu PT. Petrogas Jatim Utama serta beberapa staff kelurahan untuk membantu mensosialisasikan program dan menampung keluhan warga mengenai program gas bumi tersebut dan CV. Gemilang sebagai pihak swasta sebagai penyedia alat-alat. Mereka saling mendukung adanya program ini guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Sikap/Kecenderungan (disposisi) Agen Pelaksana

Pada model kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Sikap dari agen pelaksana turut mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Pada variabel disposisi agen pelaksana atau implementor ini mencakup tiga hal didalamnya, yakni respon keseriusan implementor terhadap pelaksanaan harga jual gas bumi melalui pipa PT. Petrogas di Desa Ngingas yang dapat mempengaruhi implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut, selanjutnya kondisi pemahaman implementor terhadap kebijakan atau program, serta intensitas disposisi implementor yang merupakan bagian dari preferensi nilai-nilai yang dimiliki oleh implementor kebijakan.

Berkaitan dengan penelitian ini, pelaksanaan harga jual gas bumi melalui pipa PT. Petrogas Jatim Utama di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan mendapatkan respon positif dari agen pelaksana yakni selaku operator jaringan PT. Petrogas Jatim Utama dan staff kelurahan Desa Ngingas sudah memahami

tugas dan fungsi masing-masing dan para petugas dari PT. Petrogas Jatim Utama sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, seperti teknisi yang ditugaskan untuk melakukan cek meter dan pemasangan alat baru serta beberapa staff yang ditugaskan di loket-loket yang disediakan.

5. Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi merupakan salah hal penting yang harus diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan. Donald Van Metter dan Carl Van Horn, menjelaskan bahwa komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang efektif dalam sebuah implementasi kebijakan publik. Adanya komunikasi dan koordinasi yang intens dapat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu implementasi.

Komunikasi dan sosialisasi pada implementasi program *City gas* dalam hal harga jual gas bumi untuk konsumen rumah tangga melalui pipa distribusi di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sudah dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan oleh agen pelaksana dilakukan melalui brosur, edaran yang tertempel di loket-loket pembayaran dan sosialisasi secara langsung. Namun pada pelaksanaannya juga sangat disayangkan karena tidak semua warga mengetahui informasi yang diberikan oleh agen pelaksana. Kurang meratanya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan kesalah pahaman dalam hal ini adanya keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan diputusnya sambungan jaringan gas yang mengalir ke rumah-rumah warga.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik turut menjadi faktor yang dapat mempengaruhi implementasi. Keadaan ekonomi warga Desa Ngingas yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian usaha logam atau menjalankan UMKM, pedagang dan buruh dengan adanya peraturan batas minimal pembayaran dalam pemakaian gas bumi dirasa membebankan pengeluaran meskipun harga yang telah ditetapkan relatif lebih murah dari harga *elpiji*.

Adanya inovasi dari PT. Petrogas Jatim Utama selaku operator dengan menerapkan pembayaran secara online belum dilaksanakan di Desa Ngingas ini sendiri, mengingat minimnya pengetahuan mereka mengenai pembayaran melalui Bank dengan menggunakan rekening dan karakteristik warga Desa Ngingas yang kurang bisa bertanggungjawab dalam hal kepemilikan alat. Sedangkan di Desa lain pembayaran melalui online tersebut sudah mencapai 20 % dari pengguna gas bumi. Dari segi lingkungan politik, adanya dukungan dari pihak-pihak yang terlibat semua masyarakat dan agen pelaksana mendukung dengan keberadaan program *City Gas* ini. Pihak Desa memberikan dukungan terhadap pembangunan pipa jaringan gas di Desa tersebut. Sebagai operator PT petrogas Jatim Utama juga bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal pengadaan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan atau program menurut Van Metter dan Carl Van Horn dalam implementasi harga jual gas bumi melalui pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yakni:

Pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan, ukuran keberhasilan dari kebijakan Program *City Gas* di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yaitu seluruh masyarakat di Desa Ngingas tersebut. Saat ini, masyarakat di Desa Ngingas yang menggunakan gas bumi tersebut mencapai 2000 KK dari 3459 KK. Harapannya penggunaan gas bumi tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Desa Ngingas, dan dapat berkembang di kota-kota lain. Pada variabel sumber daya, dalam penyelenggaraan harga jual gas bumi belum optimal, meskipun dalam pelaksanaannya sudah didukung oleh adanya petugas yang berkompeten dan didukung pula dengan jumlah pegawai yang memadai yakni 33 pegawai yang bekerja di loket dan teknisi, namun perlu adanya pengawasan yang intensif dari pegawai Petrogas Jatim Utama dan pihak Kelurahan dalam kegiatan penyambungan pipa yang dilakukan sendiri

oleh warga. Pada pelaksanaan harga jual gas bumi masyarakat ada yang melakukan penyambungan jaringan gas sendiri dan belum ada pengawasan tindakan tegas dari operator atau agen pelaksana.

Terkait dengan sumber daya finansial, seluruh alat yang digunakan gratis, dibiayai oleh APBN seperti pipa yang tersambung kerumah-rumah warga serta alat cek meter yang dapat digunakan sebagai pembayaran tagihan setiap bulannya. Kemudian setiap bulan konsumen sendiri yang harus membayarkan tagihan sesuai dengan jumlah yang tertera di alat cek meter tersebut dengan harga Rp 3.148,- per meter kubik sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Petrogas Jatim Utama Untuk konsumen Rumah Tangga pada Jaringan Pipa Distribusi di Kelurahan Wedoro dan di Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Konsumen dibebankan biaya sebesar Rp 5.000.000 untuk pemasangan baru dan Rp 500.000 untuk penyambungan jaringan gas yang sebelumnya telah diputus oleh operator karena keterlambatan atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan. Sumber daya waktu dalam penelitian ini, pembayaran tagihan yang dibebankan untuk konsumen dibayarkan dalam dua gelombang. Pertama, pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 di loket yang terletak di Desa Ngingas, dan tanggal 26 sampai tanggal 10 di kantor pusat Petrogas Jatim Utama berlokasi di Ruko Rungkut Madya. Serta dalam pelaksanaannya, program *City Gas* didukung dengan adanya fasilitas alat-alat yang memadai dan berstandar Nasional Indonesia.

Agen pelaksana dalam program *City Gas* terkait dengan pelaksanaan harga jual gas bumi untuk konsumen rumah tangga adalah PT Petrogas Jatim Utama bertindak sebagai operator dan staff Kelurahan Desa Ngingas juga berperan sebagai pengawas. Tidak hanya dukungan dari warga Desa Ngingas yang menjadi target *group*, operator dan staff Kelurahan juga mendukung adanya program tersebut. Hal ini terlihat dari keikutsertaan mereka dalam mensosialisasikan program *City Gas* tersebut, meskipun sosialisasi yang agen pelaksana lakukan belum merata.

Berdasarkan hasil penelitian, sikap atau kecenderungan dari agen pelaksana dalam hal ini baik petugas maupun pengawas yang ditugaskan menerima atau memberikan respon positif selama pelaksanaan. Agen pelaksana menjalankan tugas dan fungsinya dibidang masing-masing, meskipun ada beberapa

warga yang kurang begitu setuju dengan diberlakukannya aturan batas minimal penggunaan, agen pelaksana tetap menjalankan fungsinya.

Terkait dengan variabel komunikasi atau koordinasi, hubungan diantara agen pelaksana berjalan cukup baik, namun belum maksimal. Hal ini terbukti bahwa adanya sosialisasi pada konsumen rumah tangga yang belum merata terkait dengan biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran dan mengakibatkan pemutusan sambungan jaringan gas serta belum adanya sosialisasi yang optimal terkait dengan inovasi pembayaran melalui sistem online dalam rangka peningkatan mutu layanan.

Pada variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Mayoritas Desa Ngingas yang bermata pencaharian atau pelaku usaha logam, pedagang dan buruh dengan adanya abonemen membuat sebagian orang merasa terbebani dengan adanya pembatasan penggunaan gas bumi tersebut, meskipun harga yang telah ditetapkan relatif lebih murah dari harga *elpiji*. Lingkungan sosial juga mempengaruhi dalam hal ini, warga masih banyak yang belum mengerti dengan pembayaran tagihan melalui online, adanya perubahan ID yang terpasang pada alat cek meter yang disesuaikan dengan ID bank dan ID pendaftaran Petrogas juga menyebabkan inovasi ini tidak berjalan. Adanya perubahan ID disebabkan oleh pemindahan alat cek meter yang tidak digunakan lagi oleh warga, akibat pemutusan jaringan karena warga tidak membayar dan alat tersebut dipindahkan ke rumah warga lain, serta minimnya pengetahuan warga mengenai rekening bank sehingga pembayaran dengan sistem online tidak berjalan optimal. Lingkungan politik dapat dilihat dari adanya dukungan dari Kelurahan dalam pengawasan penanaman pipa jaringan gas dan operator yakni PT Petrogas juga melibatkan pihak swasta dalam hal penyediaan alat-alat yang dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, faktor yang menjadi kelemahan dalam implementasi harga jual gas bumi melalui pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program *City Gas*, yang perlu diperhatikan sebagai bahan masukan adalah :

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih merata kepada konsumen khususnya warga Desa

Ngingas terkait dengan informasi keterlambatan pembayaran tagihan setiap bulannya dan sanksi yang harus diterima serta lebih mengoptimalkan sosialisasi pembayaran secara online sehingga inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan dapat berhasil. Serta perlu adanya SOP yang memuat mengenai pelayanan untuk konsumen.

2. Perlu adanya perbaikan jaringan gas dalam menjamin volume pasokan dan tekanan gas bumi dan pemeriksaan alat-alat jaringan gas. Hal ini terkait dengan nyala api yang kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung:Alfabeta.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dunn, N William. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Teori Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan RND*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta. Media Presindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta:CAPS.
- Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2012 **Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Petrogas Jatim Utama Untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi Di Kelurahan Wedoro Dan Di Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.
- Ellisa, 2012. *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Liquified Petroleum Gas) Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*. Skripsi. Universitas Lambung Mangkurat.
- Khamdun, Moh. *Optimalisasi manfaat City Gas*. Suara Banyuurip.com. (Diakses minggu, 28 September 2014).
- <http://www.surabaya.go.id/berita/detail.php?id=12621> (Diakses tanggal 7 Maret 2015).
- [http://dprd-sidoarjo.go.id/sambungan-gas-rumah-tangga-lebih-menguntungkan .html](http://dprd-sidoarjo.go.id/sambungan-gas-rumah-tangga-lebih-menguntungkan.html), (Diakses tanggal 24 November 2014)
- Lembaran Data Kependudukan Kelurahan Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Buku petunjuk pengguna gas bumi untuk konsumen rumah tangga PT. Petrogas Jatim Utama.
- Kumpulan *Standart Operasional Prosedur (SOP) City Gas*, PT.Petrogas Jatim Utama.
- Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Jargas Sidoarjo oleh PT Petrogas Jatim Utama, 23 November 2011.